

Judul : Rumah mewah dapat BSPS, komisi V minta PKP perkuat pengawasan
Tanggal : Rabu, 01 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Rumah Mewah Dapat BSPS Komisi V Minta PKP Perkuat Pengawasan



Mori Hanafi

ANGGOTA Komisi V DPR Mori Hanafi menyoroti pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Ditemukannya, ada warga yang memiliki rumah mewah menerima dana bantuan, padahal sebenarnya tidak layak.

Bahkan, kata Mori, peristiwa yang terjadi di dapilnya di Nusa Tenggara Barat (NTB) itu membuat warga marah hingga memicu demonstrasi dan penyegekan kantor kelurahan. Setelah ditelusuri, kecurangan didalangi oknum Tenaga Fasilitator Lapangan

(TFL) yang memasukkan data keluarganya sendiri.

Mori menjelaskan, oknum TFL itu ternyata saudara kandung istri pelaku dan tidak memenuhi syarat menerima bantuan. "Kasus penyalahgunaan dana yang hanya Rp 20 juta ini sangat memalukan. Uang negara harus ditertibkan karena hak milik warga miskin," ujar Mori, Minggu (28/6/2026).

Dia mempertanyakan sejauh mana kewenangan yang dimiliki seorang TFL. Apakah untuk menjadi seorang TFL harus melalui pendidikan atau memenuhi kriteria tertentu. Karena sikap arogan oknum itu membuat persoalan yang seharusnya tidak perlu dibahas di rapat DPR, malah jadi mengemuka.

Mori mendesak sistem verifikasi data dan pengawasan penerima BSPS diperketat hingga ke tingkat paling bawah. Langkah ini untuk memastikan setiap rupiah uang negara keluar bisa tersalurkan dengan tepat. "Alokasi wajib diterima

masyarakat prasejahtera yang berhak," tegasnya.

Ketua Komisi V DPR Lasarus menambahkan, temuan itu membuktikan lemahnya sistem pengawasan internal Kementerian PKP. Karena sebenarnya program fisik seperti BSPS sangat mudah diawasi karena wujudnya kasat mata. Untuk itu, Inspektorat Jenderal Kementerian PKP wajib menindak tegas oknum curang.

Dia menegaskan, jika penerima memang tidak layak menerima bantuan BSPS, maka dananya jangan dicairkan. Para kepala balai di daerah harus berani menghadapi dan menindak hal tak masuk akal. "Penegakan hukum wajib berjalan jika ada oknum yang ngotot melanggar aturan," ingatnya.

Upaya mewujudkan akuntabilitas ke lapangan, kata dia, terhambat karena ketiadaan alokasi anggaran operasional. Kondisi ini justru akan membuat Komisi V dan Badan Anggaran DPR bingung jika muncul temuan. Apalagi, pegawai tidak mungkin memotong gaji mereka untuk biaya kerja.

Dia mengatakan, penguatan fungsi pengawasan dan kelengkapan validasi data jadi kunci utama penyelesaian masalah. Insiden salah sasaran tidak boleh terulang lagi pada masa mendatang. "Pelanggaran bisa dicegah jika proses pemantauan internal oleh instansi terkait dilakukan secara maksimal," ucapnya.

Menanggapi temuan itu, Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel memastikan tidak ada toleransi terhadap penyelewengan dan fraud. Seluruh hal yang terkait tindakan korupsi akan ditindak tegas serta diinvestigasi. Ditegaskan, kasus ini akan dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi kementerian.

Terlepas dari kasus itu, program BSPS tetap jadi prioritas utama pada 2027. Dari total pagu indikatif sebesar Rp 9,913 triliun, Kementerian mengalokasikan sekitar Rp 8,9 triliun untuk program itu. "Namun sebenarnya angkanya belum mampu mendukung seluruh target pembangunan fisik," jelasnya. ■ TIF